**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK
OLEH KEPOLISIAN SEKTOR MANDAU**

Oleh : Defira Ratu Sari Fitri

Pembimbing 1 : Dr. Dessy Artina, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Erdiansyah, S.H., M.H

Alamat : Jalan Melati 2, Perumahan Alfa Permata Melati Blok D3, Panam, Pekanbaru

Email : Defirasafitri6@gmail.com – Telepon: 085374007015

ABSTRACT

Increasing crime in Indonesia results in the emergence of various modus operandi in the occurrence of criminal acts. In addition, the lack of public knowledge about criminal law causes one to be a victim of a criminal act or a criminal offender. One of the perpetrators is a criminal act of abuse. The offense of abuse is a criminal offense and violates decency and decency. Restorative Justice is an alternative or other way of criminal justice by putting forward the integration approach of the perpetrator on the one hand and the victim / community on the other as a unity to seek. Restorative Justice is the concept of completion on the effort of retaining or repairing / restoring damaged condition or condition as result of a crime. The ones to be restored / repaired / restored are victims, perpetrators of criminal acts, and other damages caused by criminal acts in the community. Therefore, it needs to be studied simultaneously about the First Implementation of Restorative Justice in the settlement of crime against children in Police Sector Mandau. Second, the role of the Mandau Sector Police in settling criminal acts of child abuse.

The type of research used in the writing of this law is the study of sociological law. Population and sample are all parties related to the problem studied in this research, data source used, primary data, secondary data, and tertiary data, data collecting technique in this research by interview and literature study.

The results showed that there are two main points that can be concluded. First, Restorative Justice can repair damages or losses, restore the situation as it was, and restore the quality of the relationships of the parties involved and related. Not all cases of abusive offenses can be resolved with penal mediation. Rather there must be a selection of crimes that have been committed or are being dealt with. So if it is done with the situation of the victim full of injuries, the recidivists and the occurrence of intercourse, then can not be settled by mediation but done according to the applicable law. Second, the role of the Mandau Sector Police in the settlement of criminal acts of abuses against children, such as Pre-emptive Action and Pre-Ventive (non-penal) Action. The author's suggestion Firstly, the police should improve and maximize its performance in order to implement the protection of the rights of victims of the crime of child abuse in accordance with Law Number 35 Year 2014 regarding the amendment to Law Number 23 Year 2002 regarding Child Protection. Second, For the government so that the investigator / auxiliary investigator to immediately issue a Government Regulation or Legislation Law which is the legal basis for investigators in the application of the concept of Restorative Justice settlement of criminal acts of child abuse.

Keywords: Implementation - Restorative Justice - Obscene - Underage

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep Rumusan Masalah:

1. Bagaimanakah Implementasi Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh Kepolisian Sektor Mandau?
2. Bagaimana peran Kepolisian Sektor Mandau dalam penyelesaian tindak pidana pencabulan terhadap anak?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh Kepolisian Sektor Mandau.
2. Untuk mengetahui peran Kepolisian Sektor Mandau dalam penyelesaian tindak pidana pencabulan terhadap anak.

C. Kegunaan Penelitian

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan hasilnya bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana. Hasil penelitian ini juga bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan peneliti sebagai wujud konkrit dari realisasi penerapan ilmu di bidang hukum yang penulis dapatkan selama ini.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi fungsionaris hukum dalam penegakan hukum pidana, khususnya mengenai penyelesaian perkara diluar pengadilan yang disebut dengan *Restorative Justice*.
3. Hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi kalangan akademis dan masyarakat untuk mengetahui dan memahami bahwa proses penyelesaian perkara dapat dilakukan diluar pengadilan atau *Restorative Justice*.

D. Kerangka Konseptual

1. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.
2. Penegakan hukum adalah proses atau cara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar suatu peraturan perundangan-undangan dapat ditaati oleh masyarakat tanpa terkecuali.¹ Penegakan hukum menurut Mertokusumo mempunyai 2 (dua) makna yaitu bagaimana hukum itu dilaksanakan, sehingga dalam penegakkan hukum tersebut harus memperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.
3. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) adalah suatu penyelesaian secara adil yang menimbulkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait bdalam tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali keadaan semula.²
4. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.³
5. Pencabulan adalah suatu perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan dan kesusilaan. Pencabulan adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan diri sendiri maupun

¹ Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta: 2008, hlm. 102.

² Bagir Manan, "Hakim Sebagai Pembaharuan Hukum", *Jurnal Varia Peradilan*, No. 254 Januari 2007, IKAHI, Jakarta, hlm. 10.

³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Reflika Aditama, Riau: 2014, hlm. 100.

dilakukan pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian alat tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.⁴

6. Tindak Pidana Pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin perempuan.⁵
7. Pengertian anak secara umum dipahami masyarakat keturunan kedua setelah ayah dan ibu.⁶ Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua.⁷ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) anak adalah yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun.⁸
8. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.⁹
9. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰

10. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.¹¹

E. Kerangka Teori

1. Konsep Tindak Pidana

Pembentukan Undang-Undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebut nama tindak pidana. Dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata yaitu *Stafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* diartikan kenyataan. Sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti dapat dihukum.¹²

Istilah tindak pidana disebut juga dengan delik. Tindak pidana atau delik tindak pidana yang mengandung 5 unsur yakni :¹³

- a. Harus ada sesuatu kelakuan;
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang;
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;

⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Pres, Jakarta: 2005 hlm. 80.

⁵ Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiny*, Sinar Grafika, Jakarta: 2004, hlm. 64.

⁶ WJS.Poersdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1992, hlm. 38.

⁷ Emilda Firdaus dan Sukamariko Andrikasmi, *Hukum Perlindungan Anak dan wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru: 2016, hlm. 14

⁸ Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm. 5.

¹³ C.T.S Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta: 2004, hlm. 37.

- d. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;
- e. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosokan penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan.¹⁴

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan aktualisasi dari aturan hukum yang masih berada dalam tahap cita-cita, dan diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan cita-cita atau tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum pada hakikatnya adalah untuk menyatakan sesuatu aturan untuk menjamin kepastian hukum itu.¹⁵

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian hidup.¹⁶ Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut.

Menurut Soejono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :¹⁷

- a. Faktor hukumnya sendiri
Dalam faktor ini lebih menekankan pada Peraturan Perundang-

Undangannya, jika terjadi tindak pidana tetapi aturannya tidak jelas maka penegakan hukum akan terhambat.

- b. Faktor penegak hukum
Faktor ini yakni pihak-pihak yang membentuk ataupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas
Faktor ini sebagai penunjang dalam berjalannya penegaka hukum mencakup tenaga manusianya, peralatannya dan keuangannya.
- d. Faktor masyarakat
Faktor ini yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan
Sebagai hasil karya, cipta dan rasa didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Dengan banyak faktor yang mempengaruhi penegakan hukum maka peran dan keaktifan kepolisian menjadi sangat penting, karena kepolisian menjadi sub sistem dalam penegakan hukum yang berfungsi dibidang, perlindungan dan pelayana masyarakat. Dengan polisi sebagai penegak hukum maka peran kepolisian dalam memberantas kejahatan sangat dinantikan oleh masyarakat terutama kejahatan tindak pidan pencabulan, oleh karena itu masyarakat mengharapkan bahwa polisi akan dapat melindunginya, maka dengan sendirinya polisi harus mengenal lingkungan tempatnya bertugas dengan sebaik-baiknya.

3. Konsep Restorative Justice

Program *Restorative Justice* di negara yang sudah lebih dahulu menggunakannya seperti New zeland,

¹⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 80.

¹⁵ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm. 83.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm. 5.

¹⁷ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 5.

Kanada, dan Inggris telah berhasil mengurangi kejahatan dan memulihkan korban kejahatan atau pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Keterlibatan korban dalam proses *Restorative Justice* meliputi perbaikan material, memperbaiki emosi termasuk harapan, perbaikan harga diri dan kehormatan, serta yang terpenting adalah partisipasi penuh dalam penanganan kasus.¹⁸

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *Restorative Justice* yang dalam tulisannya mengulas tentang reparation menyatakan bahwa *Restorative Justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.¹⁹

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian sosiologis. Penelitian hukum sosiologis sebagai penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Sektor Mandau, yang terletak di jalan Jend. Sudirman Duri 28884, Provinsi Riau. Karena banyaknya kasus Tindak Pidana Pencabulan yang

terjadi terhadap anak, dan juga ada kasus yang diselesaikan dengan *Restorative justice* padahal peraturan baku mengenai penyelesaian hukum secara *Restorative justice* belum ada.

3) Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari unit kerja atau individu yang akan diteliti, sifat dan karakteristiknya. Sebagaimana yang dikemukakan sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁰

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kanit Kepolisian Sektor Mandau, Penyidik, Ketua Satgas P2TP2A, KUPT P2TP2A.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang telah dipelajari dari sampel tersebut, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul *representative* atau mewakili.²¹

4) Sumber data

Memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perspektif mengenai apa yang seyogyannya, diperlukan sumber-sumber penelitian.²² Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian sosiologis ini, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 2 (dua) macam:

¹⁸ Rena Yulia, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2010, hlm. 189.

¹⁹ <http://www.sejarahperkembangankonsepdiversiandrestorativejustice.com>, diakses pada tanggal 01 januari 2018.

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung: 2010, hlm. 90.

²¹ *Ibid*, hlm. 91.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta: 2005, hlm. 35.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden baik data dari sampel maupun informan dari penelitian. Data tersebut berkaitan dengan Pelaksanaan Dismisal Prosedur di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Provinsi Riau.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber bahan hukum tersebut, antara lain:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²³ Peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam penelitian ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Implementasi *Restorative justice* terhadap Pencabulan;

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁴ Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisikan mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik

para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²⁵ Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal.²⁶

c) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.²⁷ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5) Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan, maka dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan.

b. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu mengkaji, menelaah dan menganalisa berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

6) Analisis Data

Data dan bahan yang terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid*, hlm. 142

²⁶ *Ibid*, hlm. 143

²⁷ Soerjono Soekanto Dan Sre Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 13.

diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dilakukan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta dilapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini. Sedangkan metode berpikir yang digunakan oleh penulis yaitu deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak oleh Kepolisian Sektor Mandau

Ketika berbicara tentang kejahatan maka seringkali yang pertama muncul di pikiran kita adalah pelaku kejahatan. Biasanya menyebut mereka penjahat, kriminal atau lebih buruk lagi, sampah masyarakat, dan masih banyak lagi. Masyarakat sudah terbiasa memandang pelaku sebagai satu-satunya faktor dalam kejahatan. Tidak mengherankan bila upaya penanganan kejahatan masih terfokus pada tindakan penghukuman terhadap pelaku. Memberikan hukuman kepada pelaku masih dianggap “obat manjur” untuk “menyembuhkan” baik luka tau derita korban maupun kelalaian perilaku yang “dianggap” pelaku kejahatan.²⁸

Ironisnya hampir seluruh tindak pidana kejahatan yang ditangani sistem peradilan pidana di Indonesia berakhir di penjara. Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-

masalah kejahatan, khususnya tindak pidana dimana “kerusakan” yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat masih bisa di restorasi sehingga kondisi yang telah rusak dapat dikembalikan seperti keadaan semula, sekaligus penghilangan dampak buruk penjara dalam menyikapi tindak kejahatan yang dianggap dapat direstorasi kembali.²⁹

Banyaknya kasus anak yang terjadi akhir-akhir ini makin meningkatkan keprihatinan kita semua, dalam meminimalisir kasus yang merugikan anak, Negara/Pemerintah telah berupaya memberi perhatiannya dalam wujud Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun hal tersebut belum mampu menekan peningkatan kuantitas dan kualitas kasus yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana.³⁰

Salah satu pelaku menyimpang adalah tindak pidana pencabulan, yang merupakan perwujudan dari seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar asas kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan lain yang keji. Semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, contoh cium-ciuman, meraba-raba buah dada yang dilakukan terhadap anak dan juga bisa dilakukan terhadap teman, pacar atau keluarga sendiri.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang

²⁸ Singgih Warsito Kurniawan, “Implementasi Restorative Justice pada Penegakan Hukum Pidana Pencabulan oleh Anak di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 51

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Mukhlis R, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kejahatan Pelecehan Seksual di Pekanbaru”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, hlm. 43.

perempuan.³¹ Tindak pidana pencabulan diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) pada Bab XIV Buku ke –II Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).

Secara formal di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak atau belum disebutkan berlakunya keadilan restoratif, tetapi dalam praktiknya sudah dilaksanakan, yaitu dengan adanya penyelesaian perkara secara kekeluargaan.³² *Restorative justice* sebagai konsep pemidanaan bermaksud menemukan jalan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang. Misalnya antara kepentingan pelaku dan korban. Akan tetapi *Restorative justice* tidak hanya merumuskan tujuan pemidanaan. Tidak kalah pentingnya adalah mekanisme mencapai tujuan.³³

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Tahun 2012 tentang Sistem Pemidanaan Pidana Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.³⁴

Didalam *Restorative Justice*, pelaku; korban; dan masyarakat dianggap sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian tindak pidana, disamping negara sendiri. Keterlibatan pihak-pihak tersebut khususnya pelaku; korban; dan masyarakat, dalam penyelesaian tindak pidana dianggap bernilai tinggi.

Penanganan perkara dengan pendekatan *Restorative Justice*

menawakan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan *Restorative Justice* makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan *Restorative Justice*, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciotakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian permasalahan yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi, dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.³⁵

Dalam pelaksanaan *Restorative Justice* melibatkan berbagai pihak yang bersengketa di dalam musyawarah pemulihan penyelesaian kasus diantaranya:

- a. korban dan keluarga korban karena korban adalah bagian dari konflik, kepentingan korban dalam proses pengambilan keputusan serta konflik merupakan persoalan keluarga.
- b. Pelaku dan korban karena pelaku merupakan pihak yang mutlak dilibatkan.
- c. Wakil masyarakat guna mewakili kepentingan dari lingkungan lokasi peristiwa pidana terjadi dan kepentingan-kepentingan yang bersifat publik.

Dalam Hukum Positif Indonesia perkara Pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi

³¹ Leden Marpaung, *Loc.cit*, hlm. 64.

³² R.Wiyono, “*Sistem Peradilan Pidana Anak*”, Sinar Grafika, Jakarta: 2016, hlm. 38

³³ *Ibid*.

³⁴ *Ibid*. hlm.40

³⁵ *Ibid*. hlm. 36.

dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya.³⁶

Restorative Justice sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Munculnya *Restorative Justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, dan pelaku dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.³⁷

Menurut R. Hutahaean selaku Panit 1 Reskrim Polsek Mandau, proses penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak sepanjang perkara nya sudah dilaporkan akan tetap dilanjutkan sampai ke proses persidangan. Karna mengingat sekarang kejahatan terhadap anak sangat banyak dan ini menimbulkan banyak perhatian. Dan untuk mengimplementasikan konsep *Restorative Justice* tidak terlalu banyak dilakukan karena belum adanya aturan hukum ataupun mekanisme formal. Tetapi konsep *Restorative justice* dapat dilakukan jika pelakunya berusia dibawah 14 tahun. Dan untuk usia di atas 14 tahun dapat dilakukan konsep *Restorative justice* tetapi harus melihat dari kondisi korban. Misal dari segi luka (parah atau tidak), atau hanya dipegang-pegang. Karna jika hanya dipegang-pegang dan luka kecil maka akan menjadi pertimbangan oleh pihak penyidik dan tim penyidik akan melihat

dari segi situasinya. Kerena sebenarnya tidak semua kasus tindak pidana pencabulan dapat diselesaikan dengan mediasi penal. Melainkan harus ada seleksi dari tindak pidana yang telah dilakukan atau yang sedang ditangani. Maka jika sudah dilakukan dengan keadaan korban yang penuh luka-luka dan telah terjadinya persetujuan, maka tidak bisa diselesaikan secara mediasi melainkan dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku.³⁸

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Panit 2 Reskrim Polsek Mandau, implementasi *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencabulan terhadap anak bisa dilakukan jika memenuhi syarat-syarat yaitu: *pertama*, pelaku harus mengakui kesalahannya dan jangan sampai dia mengakui kesalahannya karena disuruh oleh orang lain untuk mengakui atas perbuatannya. *Kedua*, korban ingin memaafkan. *Ketiga*, pelaku bukan *Resedivis* yaitu pelaku bukan yang berulang-ulang kali melakukan tindak pidana pencabulan. *Keempat*, jika tidak ada luka parah dan *Kelima*, tidak terjadinya persetujuan. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi maka kasus tindak pidana oencabulan tersebut bisa dilakukan dengan *Restorative justice*.³⁹

Menurut Silvia Novita penyidik pembantu di Kepolisian Sektor Mandau, ada salah satu kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan dengan *Restorative justice*. Dimana kronolginya, ada seorang ibu yang datang ke Kepolisian Sektor Mandau dan membawa anaknya yang menjadi korban dari tindak pidana pencabulan. Setelah ditangani dengan baik oleh pihak Kepolisian ternyata sang ibu meminta untuk dilakukannya *Visum*. Tujuan beliau melakuka *Visum* adalah

³⁶ Ferawati, Op.cit hlm. 37.

³⁷ *Ibid*.

³⁸ Wawancara dengan Bapak R. Hutahaean Panit 1 Reskrim Polsek Mandau, Hari Kamis 22 Februari 2018. Bertempat di Kepolisian Sektor Mandau.

³⁹ Wawancara dengan Panit 2 Reskrim Polsek Mandau, Hari Kamis 22 Februari 2018, Bertempat di Kepolisian Sektor Mandau.

untuk mengetahui apakah anaknya masih perawan atau tidak. Karena yang bisa melakukan *Visum* hanya pihak Kepolisian saja. Dan setelah dilakukannya *Visum*, dan dinyatakan bahwa anak tersebut masih dalam keadaan perawan dan tidak terjadi persetubuhan. Lalu kemudian penyidik ingin melanjutkan kasus ini lebih dalam lagi dan mencoba untuk menghubungi ibu tersebut. Setelah dihubungi ternyata ibu tersebut tidak ingin melanjutkan kasusnya. Dikarenakan beliau tidak ingin direpotkan dengan masalah tersebut. Dan beliau juga sudah mengetahui bahwa anaknya masih perawan dan tidak disetubuhi maka beliau tidak ingin melanjutkan lagi perkaranya. Dengan kronologis kejadian diatas, dapat disimpulkan bahwa *Restorative justice* telah dilakukan di Kepolisian Sektor Mandau. Dengan syarat yang telah dipenuhi yaitu tidak menimbulkan luka berat pada korban dan juga tidak terjadi persetubuhan. Beliau hanya ingin anaknya selaku korban mendapatkan perlindungan hukum yang sebagaimana mestinya.⁴⁰

Bagir Manan menyebutkan bahwa menurut Kitayarah terdapat enam prinsip pokok sebagai kerangka kerja *Restorative justice*, yaitu sebagai berikut:⁴¹

- a. Perbuatan (tindak) pidana merupakan peristiwa manusiawi dalam wujud pelanggaran hubungan sosial, baik bersifat pribadi maupun terhadap pihak lain. Perbuatan (tindak) pidana tidak semata-mata pelanggaran hukum negara, tetapi pelanggaran terhadap orang;
- b. Tujuan peradilan adalah untuk sejauh mungkin memperbaiki kerusakan dan memulihkan hubungan, baik individu maupun masyarakat ke keadaan semula;
- c. Korban harus mempunyai kesempatan ambil bagian dalam proses, keikutsertaan dapat dalam

bentuk informasi dan dialog dengan pelaku, penyelesaian timbal balik dengan pelaku menyangkut restitusi (kompensasi), pengurangan rasa takut, meningkatkan rasa aman, tumbuhnya nharapan baru dan lain-lain;

- d. Pelaku diberi kesempatan menerima tanggungjawab dan kewajiban terhadap korban dan masyarakat pada umumnya. Keikutsertaan dalam bentuk menentukan kewajiban, berhadapan
- e. langsung dengan korban, memahami dampak perbuatan, dan lain-lain;
- f. Masyarakat sekeliling (setempat) dan sumber-sumbernya harus mengutarakan berbagai keperluan korban dan pelaku, termasuk pencegahan pelanggaran;
- g. Sistem peradilan pidana formal harus menjamin korban dan pelaku terlibat nilai yang mengikat semua peserta tanpa suatu paksaan, termasuk melakukan monitoring.

Menurut wawancara peneliti dengan ibu titik sugianti selaku KUPT (Kepala Unit Pelaksana Teknis) P2TP2A (Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), mengatakan *Restoratif Justice* itu bisa dilakukan atau bisa diterapkan jika korban yang dicabuli hanya satu orang dan bukan perbuatan berulang-ulang atau *Resedivis*. Dan *Restoratif Justice* ini dilakukan agar anak-anak yang menjadi korban ataupun pelaku dari tindak pencabulan anak ini, psikis nya tidak terganggu dan meminimalisir agar trauma tersebut tidak berlebihan. Dan juga tim dari P2TP2A (Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) ini juga berusaha untuk mengembalikan psikis (trauma) anak ini dalam keadaan semula walaupun tidak

⁴⁰ Wawancara dengan *Ibu Silvia Novita SH*, Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) Kepolisian Sektor Mandau, Hari Kamis 22 Februari 2018. Bertempat di Kepolisian Sektor Mandau.

⁴¹ Bagir Manan. *Op.cit.*

sepenuhnya kembali seperti semula. Serta dari tim P2TP2A (Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) ini juga berusaha untuk melakukan penyuluhan dan pemberian pengertian kepada masyarakat agar bisa menerima keadaan anak-anak.

Tujuan *Restorative Justice* adalah untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku dan masyarakat berkepentingan (*stakeholder*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili atau menghukum pelaku. Tujuan *Restorative Justice* adalah memperbaiki kerusakan, memulihkan kualitas hubungan, dan memfasilitasi reintegrasi para pihak yang terlibat dan terkait. Praktik *Restorative Justice* menekankan kepada para pelaku dan korban, sehingga penyelesaiannya tidak sekedar berhenti pada penghukuman pelaku tetapi pencapaian kedewasaan para pihak terkait untuk memperkuat kualitas hubungan untuk kurun waktu yang lebih panjang.⁴²

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Refri Amran selaku Ketua Satgas (Satuan Tugas) P2TP2A (Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) mengatakan bahwa *Restorative Justice* dapat dilakukan asalkan memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Salah satu syarat yang dipaparkan oleh Bapak Refri Amran adalah yang melakukan tindak pencabulan itu sekali dalam umur pelaku tersebut. Maksudnya disini adalah, *Restorative Justice* itu biasa berlaku hanya sekali dalam umur pelaku atau dalam artian lain tidak melakukan tindak pidana pencabulan secara berulang-ulang. Dan juga bila tidak terjadi luka parah dan tidak terjadinya persetubuhan maka *Restorative Justice* masih bisa untuk diterapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dan untuk perlindungan terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana pencabulan, maka akan dilakukannya

perlindungan semampu dan semaksimal mungkin dari tim P2TP2A.⁴³

Jadi berdasarkan penelitian yang telah peneliti teliti bahwa dari 24 kasus yang terjadi di Kepolisian Sektor Mandau dari tahun 2015-2017, Hanya ada 1 kasus yang dijalankan dengan Konsep *Restorative Justice* karena telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan, 17 kasus yang tidak dijalankan dengan *Restorative Justice* karena tidak memenuhi syarat dari *Restorative Justice* yang telah ditetapkan, serta 6 kasus yang tidak dijalankan dengan *Restorative Justice* padahal syaratnya telah terpenuhi. Dengan demikian, pihak Kepolisian tidak ingin menerapkan *Restorative Justice* sebagai penyelesaian tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kepolisian Sektor Mandau dan Implementasi dari *Restorative Justice* di Kepolisian Sektor Mandau ini belum berjalan dengan baik.

B. Peran Kepolisian Sektor Mandau dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Perkembangan peradapan dan pertumbuhan pada masyarakat cukup pesat. Dimana kejahatan ikut mengiringi dengan cara-cara yang telah berkembang pula. Kejahatan senantiasa ada dan terus mengikuti perubahan. Pada proses penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak melalui jalur *Restorative Justice* dapat dilakukan dengan melalui mediasi penal antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam masyarakat mediasi penal bukanlah hal yang baru lagi, ketidakbaruan mediasi penal dibuktikan dengan adanya musyawarah. Budaya Indonesia yang penuh kompromi dan kooperatif muncul dimana saja dalam berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat lebih menyukai penyelesaian sengketa dengan

⁴² Wawancara Dengan Ibu Titik Sugiarti KUART P2TP2A, Hari Rabu 21 Februari 2018, Bertempat di Kantor Camat Duri.

⁴³ Wawancara dengan Bapak Refri Amran Ketua SATGAS P2TP2A, Hari Rabu 21 Februari 2018, Bertempat di Kantor Camat Duri

membawanya ke lembaga adat untuk diselesaikan dengan damai.

Alasan dilakukan mediasi penal adalah karena kepolisian diberikan wewenang yang berupa diskresi untuk melakukan penyelesaian kasus berdasarkan pertimbangan sendiri dengan tujuan agar proses hukum yang ditangani dapat terselesaikan secara adil dan bermanfaat bagi pihak yang terlibat kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak, selain itu dari dikresi yang dimilikinya polisi kemudian diperoleh bahwa dengan cara menggunakan mediasi penal terhadap penyelesaian kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak akan diperoleh penyelesaian yang lebih bermanfaat dimana proses hukum yang menimpa para pihak dapat diselesaikan damai, sehingga tidak terjadi proses hukum yang berkepanjangan, karena proses hukum yang berkepanjangan akan dapat memakan waktu yang lama dan biaya yang banyak.⁴⁴

Tindakan penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan menggunakan mediasi penal apabila dikaji lebih jauh, merupakan suatu tindakan yang menunjung tinggi tujuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1945, yaitu perlindungan terhadap setiap warga negara. Wujud perlindungan hukum itu dalam bentuk penyelesaian konflik dalam hal ini tindak pidana pencabulan yang diselesaikan dengan mediasi penal demi menghasilkan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak yang berkonflik dan menghindarkan baik dari pelapor maupun terlapor dari proses peradilan

pidana yang cenderung memperhatikan kepastian hukum dibandingkan dengan keadilan dan kemanfaatan hukum.⁴⁵

Menurut R. Hutahaean selaku Panit 1 Reskrim Polsek Mandau, Sebenarnya tidak semua kasus tindak pidana pencabulan dapat diselesaikan dengan mediasi penal. Melainkan harus ada seleksi dari tindak pidana yang telah dilakukan atau yang sedang ditangani. jika sudah dilakukan dengan keadaan korban yang penuh luka-luka dan telah terjadinya persetubuhan, maka tidak bisa diselesaikan secara mediasi melainkan dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku.⁴⁶

Berdasarkan penjelasan diatas maka aparat kepolisian atau penyidik tidak hanya sekedar mempertimbangan pada manfaat yang didapat oleh para pihak tetapi sebelum itu dilihat terlebih dahulu akibat yang timbulkan oleh korban, apakah memungkinkan dilakukan mediasi penal. Pada mediasi penal para pihak yang terlibat dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak harus aktif terlibat dari suatu tindak pidana, selain itu keberadaan mediasi diharapkan untuk mendorong para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya secara damai.

Adapun beberapa peranan Kepolisian Sektor Mandau dalam mencegah tindak pidana pencabulan terhadap anak, yaitu:⁴⁷

1. Tindakan *Pre-emptif* (antisipasi), yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menciptakan kondisi yang kondusif dengan cara mencermati atau mendeteksi lebih awal faktor yang memiliki potensi menjadi penyebab,

⁴⁴ Irvani Nadya, "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan Restorative Justice Oleh Kepolisian Sektor Kandis", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2011, hlm. 43

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak R. Hutahaean Panit 1 Reskrim Polsek Mandau, Hari Kamis 22 Februari 2018. Bertempat di Kepolisian Sektor Mandau.

⁴⁷ Wawancara Dengan Ibu Silvia Novita SH, Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPU) Kepolisian Sektor Mandau, Hari Senin 19 Februari 2018, Bertempat di Kepolisian Sektor Mandau.

pendorong, ataupun peluang terjadinya tindak pidana;

2. Tindakan *Pre-ventif (non-penal)*, yaitu tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi tetap terpelihara, aman, dan terkendali. Tindakan *preventif* kepolisian akan tampak dalam bentuk tugas-tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan terjadinya pelanggaran hukum atau tindak pidana itu sendiri.

Dalam menerapkan atau mengimplementasikan konsep keadilan *Restorative Justice* penyidik acap sekali mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan pada proses penyidikan, terutama apabila pelaku/keluarganya dan korban/keluarganya maupun masyarakat ternyata menginginkan perdamaian dalam penyelesaian kasus atau perkaranya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya aturan ataupun payung hukum maupun prosedur/mekanisme formal untuk mengkoordinir hal tersebut sehingga situasi ini menjadi hal yang dilematis bagi penyidik. *Restorative justice* harus dijalankan dengan memberikan pemahaman terhadap korban dan pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku untuk bersama-sama memutuskan tindakan yang tepat terhadap pelaku tindak pidana.

Pengembangan prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencabulan, harus mendapat perhatian dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Untuk itu perlunya sosialisasi tentang konsep *Restorative Justice* secara luas dan berkelanjutan. Para akademis diharapkan dapat berperan aktif dalam mensosialisasikan tentang *Restorative Justice* dan pemerintah membuat kebijakan untuk pelaksanaan konsep *Restorative Justice*.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana terhadap anak di Kepolisian Sektor Mandau menjadi pilihan dari berbagai pihak yang terlibat seperti korban/keluarga, pelaku/keluarga, masyarakat dan penyidik. Dengan pertimbangan bahwa penerapan *Restorative Justice* dapat memperbaiki kerusakan ataupun kerugian, memulihkan keadaan seperti semula, dan memulihkan kualitas hubungan para pihak yang terlibat dan terkait. Praktik *Restorative Justice* menekankan kepada para pelaku dan korban, sehingga penyelesaiannya tidak sekedar berhenti pada penghukuman pelaku tetapi pencapaian kedewasaan para pihak terkait untuk memperkuat kualitas hubungan untuk kurun waktu yang lebih panjang. Tidak semua kasus tindak pidana pencabulan dapat diselesaikan dengan mediasi penal. Melainkan harus ada seleksi dari tindak pidana yang telah dilakukan atau yang sedang ditangani. Maka jika sudah dilakukan dengan keadaan korban yang penuh luka-luka, adanya resedivis dan telah terjadinya persetubuhan, maka tidak bisa diselesaikan secara mediasi melainkan dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku.

Penerapan konsep *Restorative Justice* di Kepolisian Sektor Mandau yang dilakukan hanya ada 1 kasus yang telah memenuhi syarat *Restorative Justice*, 17 kasus yang tidak dijalankan dengan *Restorative Justice* karena tidak memenuhi syarat dari *Restorative Justice*, serta 6 kasus yang tidak dijalankan dengan *Restorative Justice* padahal syaratnya telah terpenuhi. Dengan demikian, pihak Kepolisian tidak ingin menerapkan *Restorative Justice* sebagai penyelesaian tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kepolisian Sektor Mandau dan Implementasi dari *Restorative Justice*

di Kepolisian Sektor Mandau ini belum berjalan dengan baik.

2. Peran Kepolisian Sektor Mandau dalam penyelesaian tindak pidana pencabulan terhadap anak antara lain: *Pertama* Tindakan *Pre-emptif* (antisipasi), yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menciptakan kondisi yang kondusif dengan cara mencermati atau mendeteksi lebih awal faktor yang memiliki potensi menjadi penyebab, pendorong, ataupun peluang terjadinya tindak pidana. *Kedua*, Tindakan *Pre-ventif (non-penal)*, yaitu tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi tetap terpelihara, aman, dan terkendali. Tindakan *preventif* kepolisian akan tampak dalam bentuk tugas-tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan terjadinya pelanggaran hukum atau tindak pidana itu sendiri.

B. Saran

1. Pihak kepolisian harus meningkatkan dan memaksimalkan kinerjanya agar dapat melaksanakan perlindungan terhadap hak-hak korban tindak pidana pencabulan terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Bagi pemerintah supaya pihak penyidik/penyidik pembantu untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar hukum bagi penyidik dalam penerapan konsep *Restorative Justice* penyelesaian tindak pidana pencabulan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chazawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Effendi, Erdianto. 2014. *Hukum Pidana Indonesia*, Reflika Aditama, Riau.
- Firdaus, Emilda dan Sukamariko Andrikasmi. 2016. *Hukum Perlindungan Anak dan wanita*. Alaf Riau. Pekanbaru.
- Hartati, Evi. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kansil, C.T.S. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana untuk Tiap Orang*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2004 *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Preventif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soekanto, Soejono 1986 *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- _____, 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- _____, 2011. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Soekanto dan Sre Mamudji, Soerjono. 2011. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.
- Sunarso, Siswanto. 2012. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.

Wiyono. R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Sinar Grafika. Jakarta.

Yulia, Rena. 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

B. Jurnal/ Skripsi/ Kamus

1. Jurnal

Ferawati. 2016. "Model Pelaksanaan Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal Adat Berdamai pada Masyarakat Adat Tembilahan Indagiri Hilir". *Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Riau. No. 22. September.

R. Mukhlis, 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kejahatan Pelecehan Seksual di Pekanbaru". *Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Riau.

2. Skripsi

Nadya, Irvani. 2011. "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan Restorative Justice Oleh Kepolisian Sektor Kandis". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Riau. Pekanbaru.

Warsito Kurniawan, Singgih. 2015. "Implementasi Restorative Justice pada Penegakan Hukum Pidana Pencabulan oleh Anak di Rektorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Riau. Pekanbaru.

3. Kamus

Poersdarminta, WJS. 1992. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3666.

D. Internet

[http://www. Sejarah Perkembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Anak](http://www.SejarahPerkembanganKonsepDiversidanRestorativeJusticedalamPenyelesaianPerkaraAnak), diakses pada tanggal 01 januari 2018.